



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA PANJA PERUMUSAN RUU TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
KOMISI I DPR RI
KE SEMARANG, JAWA TENGAH
13-15 FEBRUARI 2020**

Panja Perumusan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR RI (Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 13-15 Februari 2020. Kunker dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dari para Stakeholder terhadap perumusan RUU tentang Penyiaran, sehingga nantinya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang disusun lebih komprehensif dan akuntabel.

Dalam Kunjungan ke Semarang, Tim Kunker Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI melaksanakan pertemuan dengan LPP RRI Semarang, LPP TVRI Jawa Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang (dihadiri juga oleh Direktur Penataan Ditjen SDPPI dan Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemkominfo), TV Lokal Jawa Tengah (Cakra TV Semarang, CTV Pati, dan TVKU Semarang), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Tengah.

Pertemuan dengan Kepala Stasiun LPP RRI Semarang dan LPP TVRI Jawa Tengah dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. “Ini adalah Kunjungan Kerja Panja Perumusan RUU Penyiaran yang pertama. Jadi LPP RRI Semarang dan LPP TVRI Jawa Tengah menjadi lembaga yang pertama kali kita kunjungi dan kita ingin mendengarkan masukan-masukan untuk Revisi RUU Penyiaran. Oleh karenanya sangat berarti sekali masukan dari Bapak/Ibu sekalian meski sebenarnya bisa saja langsung memanggil LPP RRI atau LPP TVRI pusat, akan tetapi orang daerah mungkin punya perspektif yang berbeda, sehingga RUU ini akan lebih komprehensif, maka kami kunjungi dari daerah ke daerah untuk mendengarkan masukan”, ujar Abdul.

Dalam Perumusan RUU Penyiaran, LPP RRI berharap mendapatkan perhatian khusus terkait anggaran digitalisasi.

“RRI Semarang, mohon dukungan Bapak/Ibu di sini, alat-alatnya sudah pada tua agar ada dorongan dan dukungan biaya untuk pemeliharaan khususnya dan untuk pengadaan barang-barang yang lebih digital, pemancar lebih baik lagi, umur pemancar sudah tua-tua, yang paling muda dari tahun 2015”, menurut Krismarini, Kepala Stasiun LPP RRI Semarang.

Kepala Stasiun LPP TVRI Jawa Tengah, Telman Roringpande memberikan masukan untuk RUU Penyiaran agar ada klausul yang dapat meninjau kembali terkait sistem penganggaran untuk memproduksi program-program LPP TVRI Jawa Tengah.

“Perlu adanya kecepatan dalam memproduksi, karena kalau pakai sistem yang masih PNBP, itu dua bulan sekali kami baru dapat *duit*, itulah pendapatan kami, jadi kami menunggu, pengisi acara kami hutangi dahulu, baru bisa bayar, hal ini pun terjadi kepada karyawan produksi lainnya”, keluh Telman.

Lebih dalam lagi, Telman meminta agar di dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru akan ada penekanan pada fungsi kelembagaan LPP TVRI yang lebih bersifat fungsional bukan struktural.

“Sistem kelembagaan yang telah dibicarakan dengan Dewan Pengawas LPP RRI dan LPP TVRI berkeinginan untuk TVRI ini terutama dari segi strukturnya jangan terlalu banyak, utamakan fungsional. Karenanya, kerja kreatif itu adalah kerja yang tidak perlu terhambat dengan birokrasi yang terlalu banyak”, tambah Telman.

Selanjutnya pertemuan dengan KPID Jawa Tengah, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang (dihadiri juga oleh Direktur Penataan Ditjen SDPPI dan Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemkominfo), TV Lokal Jawa Tengah (Cakra TV Semarang, CTV Pati, dan TVKU Semarang) dan PRSSNI Jawa Tengah dipimpin oleh Drs. Utut Adianto.

Dalam Rapat ini, Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemkominfo, Geryantika Kurnia yang turut hadir dan memberikan pandangannya terkait dengan urgensi migrasi analog ke digital yang tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada RUU Penyiaran.

“Ketika di daerah wilayah bencana dalam lokasi radius tertentu langsung TV, HP, radio nyambung warning untuk mitigasi. Hal itu adalah kenapa kita harus cepat migrasi dari analog ke digital. Selain itu, Kita pernah menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun 2012 dimana kita menyepakati bahwa pada tahun 2020 seharusnya ASEAN sudah pindah ke digital semua”, jelas Geryantika.

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Asep Cuwantoro meminta agar penguatan kelembagaan KPI Daerah menjadi salah satu perhatian dalam perumusan RUU Penyiaran, karena KPI Daerah adalah perwakilan masyarakat yang sesungguhnya.

“Dasar-dasar Undang-Undang Penyiaran adalah mengamankan publik untuk mengatur kepentingannya, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kelembagaan KPID sebagai representasi publik. Maka, kami berharap keberadaan KPID dalam revisi undang-undang lebih khusus diperkuat,” tegas Asep.

Pada akhir pertemuan, TV Lokal Jawa Tengah dan PRSSNI Jawa Tengah meminta dukungan kepada Komisi I DPR RI agar lebih memperhatikan kebutuhan mereka dan kehadiran mereka sebagai pemain penyiaran lokal, terutama saat merumuskan RUU tentang Penyiaran nantinya.*

Semarang, 15 Februari 2020

Tim Kunker Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI